



LAPORAN KINERJA (LAKIN)

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN ATATA RUANG



Tahun 2024

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Provinsi Bengkulu membahas pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Dalam melaksanakan mandatnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Propinsi Bengkulu telah menetapkan visi dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 yaitu **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM YANG HANDAL DAN BERKUALITAS GUNA Mendukung BENGKULU MAJU DAN SEJAHTERA”**. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu telah menetapkan 6 (enam) misi yaitu Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan provinsi, membuka akses untuk mendukung konektivitas antar wilayah provinsi khususnya daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kelancaran mobilisasi barang dan jasa; Mempercepat pembangunan layanan infrastruktur dasar Air Minum dan Sanitasi lintas Kabupaten Kota yang layak untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat; Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air, sumber air baku dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi, mendukung kedaulatan pangan dan menjaga ketahanan sumber daya air; Meningkatkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur; Melaksanakan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan; serta Meningkatkan tata kelola organisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi ketersediaan sarana informasi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kesekretariatan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2024 telah ditetapkan 11



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

(Sebelas) IKU. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu, baik dari Perjanjian Kinerja (PK), Perjanjian Kinerja Khusus, dan Perjanjian Kinerja Prioritas. Adapun pencapaian kinerja masing – masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Umum

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mencapai sejumlah indikator utama dengan kinerja yang sangat baik:

- Persentase Penanganan Jalan Provinsi Target : 1,91% dan Realisasi : 2,83%;
- Persentase Rumah tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Target : 28,13% dan Realisasi : 26,44%;
- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Non Perpipaan Target : 71,87% Realisasi : 73,56%;
- Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi Layak Target : 85% dan Realisasi : 83,61%;
- Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Baik Target : 22,72% dan Realisasi : 36,36%;
- Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan Target : 40,90% dan Realisasi : 40,90%;
- Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang Target : 27,27% dan Realisasi : 13,64%;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang Target : 9,09% dan Realisasi : 9,09%;
- Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi Dalam Kondisi Baik dan Sedang Target : 59,61% dan Realisasi : 59,61%
- Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi Dalam Kondisi Rusak Target : 40,39% dan Realisasi : 40,39%;
- Persentase Peningkatan Panjang Sungai yang di Normalisasi Target : 0,50% dan Realisasi : 1,33%;
- Persentase Pelatihan yang dilaksanakan Target : 100% dan Realisasi : 100%;
- Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang Target : 100% dan Realisasi : 100%;
- Persentase Alat Berat dalam Kondisi Baik Target : 88% dan Realisasi : 90%;
- Persentase Alat Bantu dalam Kondisi Baik Target : 35% dan Realisasi : 33,33%
- Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik Target : 95% dan Realisasi : 92,5%;
- Nilai Evaluasi SAKIP Target : BB dan Realisasi : BB.

2. Akuntabilitas Kinerja Khusus

Berdasarkan evaluasi kinerja OPD di Provinsi Bengkulu, beberapa indikator utama menunjukkan pencapaian yang tinggi. Diantara 9 (Sembilan) yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu ada 6 (enam) yang tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu Nilai AKIP OPD, Persentase Tindak Lanjut LHP OPD, Persentase Pemenuhan LPPD OPD, Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD, Persentase Pencapaian MCP Redaksi KPK, Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Indeks Profesionalisme ASN. Sedangkan ada 3 (tiga) yang tidak tercapai diantaranya Nilai Indeks RB OPD, Persentase tindak lanjut LHP OPD, dan Kategori Inovasi OPD.

3. Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Prioritas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu juga berhasil memenuhi target dalam program prioritas yang ditetapkan:



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- Panjang Pipa yang dibangun terealisasi : 105,12%;
- Penanganan Long Segmen Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini DAK terealisasi : 100%;
- Penanganan Long Segmen Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Jalan Permu Beringin Tiga DAK terealisasi : 100%;
- Penanganan Long Segmen Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Jalan Wisata Air Terjun Curup IX DAK terealisasi : 100%.

Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan baik. Sebanyak 11 sasaran yang ada terlaksana dengan capaian kinerja kategori baik persentase capaian kinerja diatas 100% yaitu sebesar **119,02%**. Rata – Rata Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu telah turut berkontribusi dalam pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Selama periode ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Berjumlah **Rp. Rp. 244.867.555.972,-** setelah APBD Perubahan Tahun 2024 Berjumlah **Rp. Rp. 249. 179.685.130,-** dengan realisasi Keuangan sampai 31 Desember 2024 sebesar **Rp. 233,456.520.076,-**

Bengkulu, 4 Februari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,



Tejo Suroso, ST. M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197812142005021003



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas rahmat, taufik, hidayah, dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 dapat selesai.

Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024. Laporan ini memuat tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu guna perbaikan program dan kegiatan ke depan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu ini.

Bengkulu, 4 Februari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,



Tejo Suroso, ST. M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197812142005021003



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| RINGKASAN EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | Vi |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A Dasar Pembentukan Organisasi..... | 1 |
| B Kedudukan Tugas dan Fungsi..... | 1 |
| C Aspek Strategis Organisasi..... | 19 |
| D Permasalahan Utama (Strategic Issue)..... | 21 |
| E Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia..... | 25 |
| BAB II PERENCANAAN STRTAGIS DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 27 |
| A Rencana Strategis..... | 27 |
| B Tujuan | 29 |
| C Sasaran | 29 |
| D Indikator Kinerja..... | 30 |
| E Startegi | 32 |
| F Arah Kebijakan..... | 34 |
| G Program Kegiatan Rencana Kinerja..... | 36 |
| H Perjanjian Kinerja..... | 37 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN..... | 43 |
| A Akuntabilitas Kinerja..... | 43 |
| B Akuntabilitas Keuangan..... | 73 |
| BAB IV PENUTUP..... | 72 |
| Penutup | 79 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 22 |
| Tabel 2.1 | Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 38 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 42 |
| Tabel 3.1 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 1 : Persentase Penanganan Jalan Provinsi..... | 44 |
| Tabel 3.1.1 | Target Indikator Persentase Penanganan Jalan Provinsi pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 45 |
| Tabel 3.2 | INDIKATOR SASARAN ESSELON II Indikator Sasaran 2 : Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dan Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan..... | 47 |
| Tabel 3.2.1 | Target Indikator Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu | 48 |
| Tabel 3.2.2 | Target Indikator Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 49 |
| Tabel 3.3 | INDIKATOR SASARAN ESSELON II Indikator Sasaran 3 : Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak..... | 50 |
| Tabel 3.3.1 | Target Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 51 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 3.4 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 4 : Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam Kondisi Baik, Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat..... | 52 |
| Tabel 3.4.1 | Target Indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam Kondisi Baik, Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 54 |
| Tabel 3.5 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 5 : Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Baik, Sedang, Dan Rusak..... | 55 |
| Tabel 3.5.1 | Target Indikator Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Baik, Sedang, dan Rusak pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu | 57 |
| Tabel 3.6 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 6 : Persentase Penanganan Normalisasi Sungai dan Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi..... | 58 |
| Tabel 3.6.1 | Target Indikator Persentase Penanganan normalisasi Sungai dan Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 60 |
| Tabel 3.7 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 7 : Persentase Pelatihan yang dilaksanakan..... | 61 |
| Tabel 3.7.1 | Target Indikator Persentase Pelatihan yang dilaksanakan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 62 |
| Tabel 3.7 | Indikator Sasaran 7..... | 57 |
| Tabel 3.7.1 | Target Indikator Presentasi Pelatihan yang dilaksanakan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 58 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| | | |
|--------------|--|----|
| Tabel 3.8 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 8 : Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang..... | 63 |
| Tabel 3.8.1 | Target Indikator Presentasi Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 64 |
| Tabel 3.9 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 9 : Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik dan Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik..... | 64 |
| Tabel 3.9.1 | Target Indikator Presentasi Alat Berat dalam Kondisi Baik dan Presentase Alat Bantu dalam Kondisi Baik pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 66 |
| Tabel 3.10 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 10 : Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik..... | 67 |
| Tabel 3.10.1 | Target Indikator Presentasi Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 68 |
| Tabel 3.11 | Indikator Sasaran Esselon II Indikator Sasaran 11 : Nilai Evaluasi SAKIP..... | 69 |
| Tabel 3.11.1 | Target Indikator Nilai Evaluasi SAKIP pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu..... | 69 |
| Tabel 3.12 | Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024..... | 71 |
| Tabel 3.13 | Perjanjian Kinerja Khusus Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2024 | 72 |
| Tabel 3.14 | Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024..... | 73 |
| Tabel 3.15 | Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2024 | 76 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

x

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

PROVINSI BENGKULU



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, merupakan suatu Organisasi Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No.1 Tahun 2021 tanggal 7 September 2021 Tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu”. Dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe B yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II/A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Pekerjaan Umum untuk membantu Gubernur melaksanakan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Provinsi.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dengan Tipologi B yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terdiri dari :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisir permasalahan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretaris;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain pada Dinas;
- e. Pelayanan informasi publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
- g. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi kepala dinas;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala dinas

Sekretaris membawahi, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan

mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang - undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan;
- b. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan, sarana dan prasarana pada Dinas;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- e. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- f. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
- g. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Dinas;
- i. Pemutakhiran informasi publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- l. Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan;
- m. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas;
- n. Pengelolaan anggaran Dinas;
- o. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- p. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas;
- q. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
- r. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

2. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sekretaris selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kelompok jabatan fungsional meliputi kelompok Sub – Substansi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

3. Bidang Sumber Daya Air

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- d. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- e. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. Menghadiri rapat teknis di bidang Sumber Daya Air;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya membawahi :

1. Kepala Seksi Pelaksanaan

mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, menyiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi;
- d. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi; dan
- f. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin perusahaan, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- d. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- e. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air;
- f. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi;
- i. Menghadiri rapat teknis operasi dan pemeliharaan;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan meliputi Kelompok Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Air.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

4. Bidang Bina Marga

Dipimpin Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu, dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana tugas Bidang Bina Marga;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Menghadiri rapat teknis bina marga;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- i. Penyusunan laporan tugas Bidang Bina Marga;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

1. Kepala Seksi Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- f. Menghadiri rapat teknis pembangunan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Preservasi

Mempunyai tugas menyelenggarakan preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Preservasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
 - c. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
 - d. Penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - f. Pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
 - g. Menghadiri rapat teknis preservasi;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Kepala Bidang Bina Marga meliputi kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

5. Bidang Cipta Karya

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- c. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional;
- f. Menghadiri rapat teknis cipta karya;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum

Mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Minum lintas kabupaten/kota; mengembangkan Sistem dan mengelola persampahan regional; mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional; mengelola dan mengembangkan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/ kota.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
- d. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- e. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- f. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- g. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Mempunyai tugas menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis; menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi; menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas kabupaten/ kota.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- b. Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- c. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- d. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- e. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- f. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- g. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
- h. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan penataan bangunan dan bangkitan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- k. Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub- Substansi Perencanaan dan Pengendalian.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- d. Pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- e. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- g. Pengembangan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- h. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- i. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi; peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- j. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- l. Menghadiri rapat teknis jasa konstruksi;
- m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Jasa Konstruksi membawahi :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis;
- d. Penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- e. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi;
- f. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

2. Kepala Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
- c. Pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. Menghadiri rapat teknis pengawasan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub-Substansi Pengaturan.

7. Bidang Tata Ruang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang; dan
- g. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- h. Menghadiri rapat teknis tata ruang;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang membawahi:

1. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, dan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- e. Menghadiri rapat teknis pengaturan dan pembinaan;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

Mempunyai tugas melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, koordinasi dan pembinaan terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang, dan operasionalisasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
- f. Pelaksanaan operasionalisasi PPNS penataan ruang;
- g. Menghadiri rapat teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub- Substansi Pelaksanaan Penataan Ruang.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara periodik. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Bengkulu dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : D.468.DPUTR. Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas, Kelas dan Fungsi Jalan Provinsi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu dimana total Panjang Jalan Provinsi sepanjang 1.330,116 km.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

2. Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jembatan merupakan prasarana penting yang menjadi penghubung antar kedua jalan yang terpisah oleh sungai/danau/rintangan lainnya. Perkembangan jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu.

3. Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya. Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan Provinsi di Provinsi Bengkulu.

4. Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043.

5. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya,



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

dinyatakan dalam persentase.

6. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT.

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Permasalahan akan diuraikan berdasarkan aspek kajian untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada pelayanan skpd tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| NO | Aspek Kajian | Faktor yang mempengaruhi | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|----|--|--|--|
| 1. | Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak | Keterbatasan anggaran untuk kegiatan yang mendukung kinerja air minum layak; Kewenangan provinsi untuk penanganan air bersih melalui SPAM Regional (lintas kabupaten/Kota). | Kewenangan penanganan lintas kabupaten/ kota atau regional sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014; Provinsi Bengkulu memfasilitasi untuk pembangunan SPAM regional untuk mengatasi kekurangan akses air bersih pada daerah rawan air di lintas kabupaten/kota sehingga masyarakat pada 3 kabupaten/kota tersebut dapat terlayani air bersih (air layak minum) |
| 2. | Persentase peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak | Keterbatasan Anggaran untuk kegiatan yang mendukung kinerja sanitasi layak; Kewenangan provinsi pada cakupan layanan sitem pengelolaan air limbah (SPAL) pada | Kewenangan penanganan lintas kabupaten/ kota atau regional sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014; Belum sepenuhnya masyarakat yang terlayani sistem air limbah untuk memenuhi kapasitas IPAL Regional; Belum adanya TPA Regional yang |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | sitem pengelolaan limbah regional seperti IPLT Komunal; Kewenangan Provinsi memfasilitasi pembangunan TPA Regional | difasilitasi oleh provinsi karena masih terkendala dengan lahan mana yang disepakati untuk pembangunan TPA regional Bengkulu tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. |
| 3. | Persentase penanganan Jalan Provinsi | Keterbatasan Anggaran dalam Penanganan Panjang Jalan Propinsi sepanjang 1.330,116 Km sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang SK jalan | Kewenangan penanganan hanya di jalan propinsi sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Jalan di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4. | Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam Kondisi Baik dan Sedang | Keterbatasan Anggaran untuk penanganan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu 1000 - 3000 Ha | Adanya dampak negatif dari perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air; Belum Optimalnya jaringan irigasi yang telah dibangun untuk mengairi sawah masyarakat; Masih sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi baik saluran primer ataupun saluran skunder; dan Belum terpenuhinya target penambahan air baku di Provinsi Bengkulu. |
| 5. | Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas Penunjang Jaringan Irigasi | | |
| 6. | Persentase Panjang Sungai yang di Normalisasi | Keterbatasan Anggaran untuk penanganan 29 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Bengkulu dengan luas 83.305,21 Km ² | Belum adanya penanganan untuk normalisasi sungai seperti pengerasan dinding sungai, pembangunan sudetan, pembuatan tanggul dan juga pengerukan |
| 7. | Persentase Bangunan Gedung | Keterbatasan Anggaran Membangun dan | Belum di updatenya data gedung strategis propinsi dengan Surat |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| | Strategis yang di tingkatkan Kualitasnya | Mengembangkan Gedung Strategis Provinsi berdasarkan Surat Keputusan tentang bangunan strategis provinsi | Keputusan Gubernur |
|-----|--|--|---|
| 8. | Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun dan direhab | Banyaknya usulan yang bukan merupakan kewenangan provinsi | Kurangnya Pemeliharaan Bangunan Gedung Yang sudah diserahkan ke Kabupaten/Kota |
| 9. | Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi beserta rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi (%) | Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Ruang Provinsi melalui Perda RTRW Provinsi dan Rincian Kawasan Strategis Provinsi (KSP) | Belum di Perdakannya Kawasan Strategis Provinsi |
| 10. | Persentase capaian kinerja tersedianya 3 (Tiga) layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (%) | Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Melatih tenaga ahli agar mempunyai sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya | Masih dibutuhkannya peningkatan sarana dan prasarana pendukung Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) |

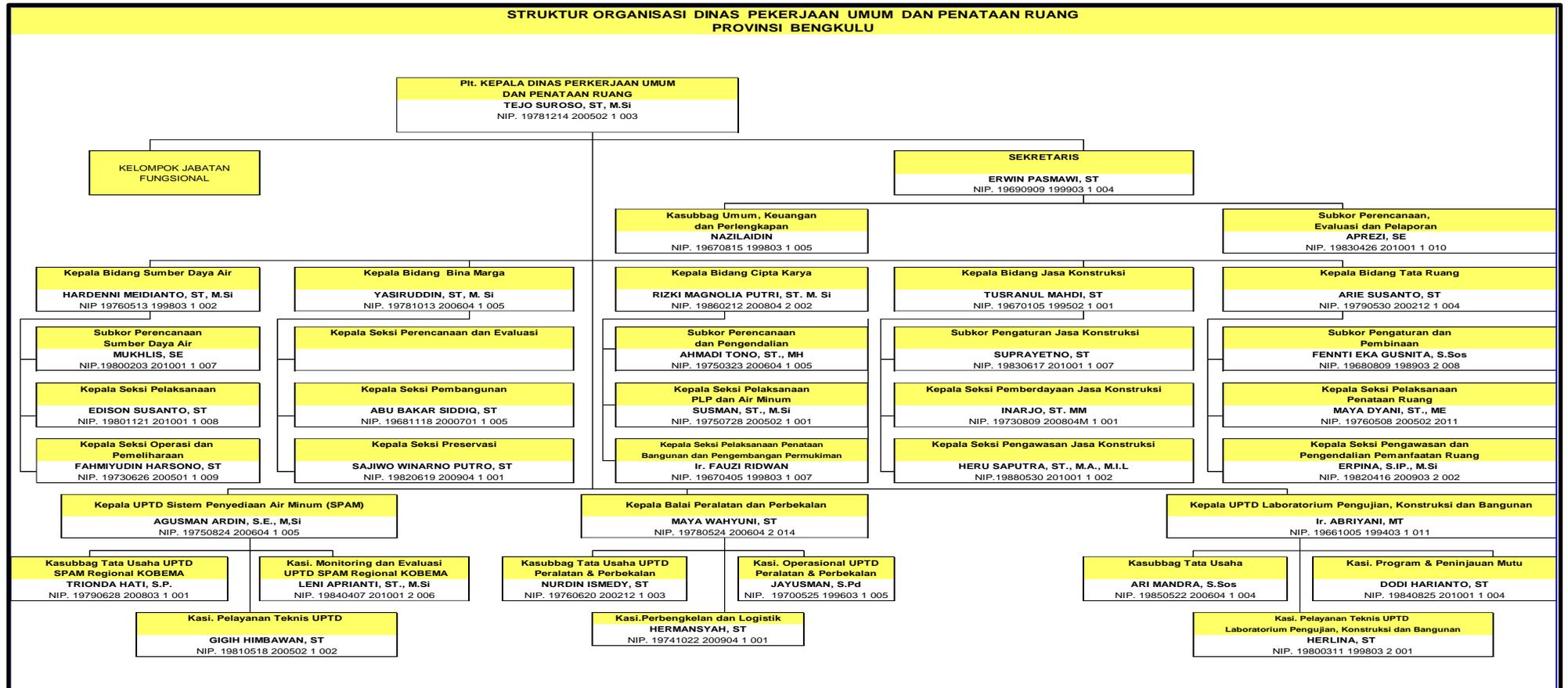


LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada dibawah ini :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sejumlah 257 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------|------------|
| | SD | - |
| | SLTP | - |
| | SLTA | 26 |
| | DI | - |
| | DII | - |
| | DIII | 17 |
| | DIV | - |
| | S1 | 196 |
| | S2 | 18 |
| | S3 | - |
| | Jumlah Total | 257 |

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

| No | Golongan Ruang | Jumlah |
|----|---------------------|------------|
| 1 | II/a | 1 |
| 2 | II/b | 5 |
| 3 | II/c | 6 |
| 4 | II/d | 14 |
| 5 | III/a | 27 |
| 6 | III/b | 54 |
| 7 | III/c | 72 |
| 8 | III/d | 53 |
| 9 | IV/a | 24 |
| 10 | IV/b | 1 |
| | Jumlah Total | 257 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah salah satu dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang sudah beberapa kali dilakukan perubahan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : Nomor : SK.050-097 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.

Penyusunan renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing stakeholder.

Penyusunan renstra memiliki berbagai manfaat bagi sebuah organisasi, misalnya memberikan kerangka dasar bagi perencanaan-perencanaan lainnya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur, sebagai titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi, membantu dan mengembangkan strategi yang efektif, dan menciptakan prioritas.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan Provinsi Bengkulu yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026). Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yaitu **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM YANG HANDAL DAN BERKUALITAS GUNA Mendukung Bengkulu Maju dan Sejahtera”**.

Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal dan berkualitas diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang produktif dan Cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, maka untuk mencapai Visi ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu , yaitu:

1. Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan provinsi, membuka akses untuk mendukung konektivitas antar wilayah provinsi khususnya daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kelancaran mobilisasi barang dan jasa;
2. Mempercepat pembangunan layanan infrastruktur dasar Air Minum dan Sanitasi lintas Kabupaten Kota yang layak untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat;
3. Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur sumber daya air, sumber air baku dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi, mendukung kedaulatan pangan dan menjaga ketahanan sumber daya air;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

4. Meningkatkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur;
5. Melaksanakan Penataan Ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
6. Meningkatkan tata kelola organisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi ketersediaan sarana informasi, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kesekretariatan.

B. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026, maka perlu dijabarkan Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jaringan jalan;
2. Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak;
3. Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan Gedung;
5. Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi;
6. Meningkatnya pengamanan terhadap Sungai;
7. Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi;
8. Terselenggaranya Penataan Ruang;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu;
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium.

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026, maka perlu dijabarkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas jaringan jalan;
2. Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak;
3. Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan Gedung;
5. Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi;
6. Meningkatnya pengamanan terhadap Sungai;
7. Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi;
8. Terselenggaranya Penataan Ruang;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu;
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Laboratorium.

D. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Adapun Indikator Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Provinsi Bengkulu, yaitu :

1. Persentase Penanganan Jalan Provinsi;
2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan;
3. Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan;
4. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak;
5. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik;
6. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi rusak ringan;
7. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi rusak sedang;
8. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi rusak berat;
9. Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam kondisi baik sedang;
10. Persentase Jaringan Irigasi Wewenang Provinsi dalam kondisi rusak;
11. Persentase Pelatihan yang dilaksanakan;
12. Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang;
13. Persentase Alat Berat dan Alat Bantu Dalam Kondisi Baik;
14. Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik;
15. Nilai E – SAKIP;

E. STRATEGI

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis. Adapun Strategi untuk mencapai tujuan dapat dirumuskan pada dibawah ini :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

1. Bidang Bina Marga

- Membangun/meningkatkan jalan untuk konektivitas antar provinsi antar kabupaten;
- Melanjutkan Penanganan Bengkulu Outer Ring Road (BORR);
- Membangun, meningkatkan, dan memelihara jalan dan jembatan provinsi;

2. Bidang Cipta Karya

- Mempercepat Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kobema;
- Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air limbah dan persampahan;
- Meningkatkan rumah tangga yang terlayani MCK/IPAL Komunal dan IPLT;
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Strategis Provinsi;
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Kawasan Gedung.

3. Bidang Sumber Daya Air

- Meningkatkan Luas Jaringan Irigasi, Rawa, dan Pengairan Lainnya;
- Memelihara Jaringan Irigasi yang telah dibangun secara rutin;
- Pengendalian daya rusak air untuk menanggulangi dan memulihkan kualitas sungai yang disebabkan oleh daya rusak air;
- Meningkatkan Panjang Sungai yang dibangun Talud/Bronjong.

4. Bidang Jasa Konstruksi

- Mengoptimalkan fungsi pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi yang lebih baik;
- Mengadakan BIMTEK untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis.

5. Bidang Tata Ruang

- Penyusunan Revisi RTRW dan kawasan Strategis Provinsi (KSP);



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- Menyelenggarakan monitoring untuk pengawasan dan pengendalian tata ruang.

6. UPTD Peralatan

- Pemeliharaan secara berkala untuk sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat berat dan Alat Bantu yang sudah ada.

7. UPTD Laboratorium Pengujian

- Peningkatan SDM Laboratorium sesuai bidang Keahlian;
- Pemeliharaan secara berkala/ kalibrasi untuk sarana dan prasarana UPTD guna meningkatkan kualitas alat Laboratorium yang sudah ada.

8. Sekretariat

- Pelatihan dan pendidikan non formal untuk ASN guna meningkatkan kualitas dan kompetensi bidang Ke PU an;
- Menyusun perencanaan berbasis kinerja, serta melaksanakan monitoring guna meningkatkan pengendalian dan pengawasan;
- Mengorganisir kebutuhan administrasi tiap bidang, menginventarisir aset sarana dan prasarana.

F. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis. Adapun Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dapat dirumuskan pada dibawah ini :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

1. Bidang Bina Marga

- Menurunkan waktu tempuh, peningkatan kinerja pelayanan jalan provinsi, dan peningkatan kinerja jalan provinsi

2. Bidang Cipta Karya

- Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema, Pendampingan Terhadap Kegiatan Air Minum Kabupaten/Kota di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Bengkulu;
- Pembangunan MCK, IPAL Komunal, IPLT dan TPA Regional;
- Membangun, Merenovasi, dan merehabilitasi Gedung Strategis sesuai dengan SK kriteria bangunan gedung strategis provinsi dan Mempercepat Pembangunan, Pengembangan Bangunan Gedung dan Kawasan Lingkungan Gedung.

3. Bidang Sumber Daya Air

- Melaksanakan rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
- Melaksanakan penanggulangan banjir melalui Pengendalian daya rusak air dan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir.

4. Bidang Jasa Konstruksi

- Membentuk Tim Pokja untuk Membantu Admin Provinsi dalam pengelolaan SIPJAKI dan Pemberian Sertifikat Tenaga Ahli; Memperbanyak Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan SIPJAKI.

5. Bidang Tata Ruang

- Mempercepat penyelesaian PERDA Revisi RTRW Provinsi dan KSP serta peraturan perundang-undangan, dan kebijakan perizinan.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

6. UPTD Peralatan

- Menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk peminjaman dan menyewaan alat.

7. UPTD Laboratorium

- Mempercepat proses legalitas (Akreditasi ISO) UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan Bangunan.

8. Sekretariat

- Mengutus ASN untuk mengikuti Bimtek, Diklat Teknis, dan pendidikan dan Pelatihan lainnya; Menyusun perencanaan, pelaporan kinerja, pengendalian dan pengawasan dengan sistem satu pintu;
- Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Pengelola Aset.

G. PROGRAM KEGIATAN RENCANA KINERJA

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Adapun Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu antara lain :

Program - Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sesuai Nomenklatur Baru yaitu :

1. Program Penyelenggaran Jalan;
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengembangan Permukiman;
4. Program Penataan Bangunan Gedung;
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;

H. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah Lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya baik dari Esselon II, III, dan IV. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi antara lain pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja (IK) dan Target IKU/IK, Program dan anggaran serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Berikut adalah IKU dan target IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2023 yang tertuang dalam PK Tahun 2024.

Dalam rangka pengukuran kinerja tahun 2024. Bahwasanya dokumen perjanjian kinerja telah di susun dalam satu dokumen dan telah di sampaikan bersamaan dengan Laporan Kinerja, dan telah diterima oleh gubernur Provinsi Bengkulu Cq. Biro Ortala. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Penataan Ruang Tahun 2024. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu ada 2 (Dua) Perjanjian Kinerja Kepala PD dan Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut ini:

TABEL 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULA PENGUKURAN | CAPAIAN EXISTING 2022/2023 | TARGET KINERJA 2024 |
|-----------|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1 | Tujuan: Meningkatnya kualitas jaringan jalan | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya kualitas jaringan jalan | Persentase penanganan Jalan Provinsi | Jumlah Total Penanganan Jalan Provinsi Tahun Berjalan / Total Panjang Jalan Kewenangan Provinsi x 100 | 4,09% | 1,91% |
| 2 | Tujuan : Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak | | | | |
| | Sasaran : Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan | Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Hasil Perhitungan BPS | 31,56% | 28,13% |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULA PENGUKURAN | CAPAIAN EXISTING 2022/2023 | TARGET KINERJA 2024 |
|----|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan | Hasil Perhitungan BPS | 41,51% | 71,87% |
| 3 | Sasaran : Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak | Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak | Hasil Perhitungan BPS | 79,58 | 85,00 |
| 4. | Tujuan/Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung | Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik | $\frac{\text{Jumlah Kondisi Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah Bangunan Gedung Strategis (Sesuai SK Bangunan Strategis)}} \times 100$ | 13,63% | 22,72% |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan | $\frac{\text{Jumlah Kondisi Bangunan Gedung Strategis Dalam Rusak Ringan}}{\text{Total Jumlah Bangunan Gedung Strategis (Sesuai SK Bangunan Strategis)}} \times 100$ | 54,54% | 40,9% |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang | $\frac{\text{Jumlah Kondisi Bangunan Gedung Strategis Dalam Rusak Sedang}}{\text{Total Jumlah Bangunan Gedung Strategis (Sesuai SK Bangunan Strategis)}} \times 100$ | 22,72% | 27,27% |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULA PENGUKURAN | CAPAIAN EXISTING 2022/2023 | TARGET KINERJA 2024 |
|----|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat | $\frac{\text{Jumlah Kondisi Bangunan Gedung Strategis Dalam Rusak Berat}}{\text{Total Jumlah Bangunan Gedung Strategis (Sesuai SK Bangunan Strategis)}} \times 100$ | 9,09% | 9,09% |
| 5 | Tujuan : Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi | Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang | $\frac{\text{Prasarana Fisik}}{\text{Bobot Prasarana Fisik}} \times 100$ | 57,4% | 59,61 |
| | | Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak | =100 - Kondisi Irigasi Dalam Kondisi Baik | 42,6% | 40,39% |
| 6 | Tujuan : Meningkatnya pengamanan terhadap sungai | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya pengamanan terhadap sungai | Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi | Panjang sungai yang dinormalisasi pada tahun berjalan / restorasi Panjang sungai wewenang provinsi x 100 | 0,46% | 0,50% |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULA PENGUKURAN | CAPAIAN EXISTING 2022/2023 | TARGET KINERJA 2024 |
|----|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|
| 7 | Tujuan : Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi | Persentase Pelatihan yang dilaksanakan | Jumlah Cakupan Layanan kegiatan yang terlaksana /jumlah Minimal cakupan layanan kegiatan x 100 | 100% | 100% |
| 8 | Tujuan : Terselenggaranya Penataan Ruang | | | | |
| | Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang | Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang | Jumlah Unsur Penataan Ruang yang dilaksanakan / Total Jumlah Unsur Penataan Ruang x 100 | 100% | 100% |
| 9 | Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu | | | | |
| | Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat | Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik | $\frac{\text{Jumlah Alat Berat Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah Alat Berat}} \times 100$ | 87,5% | 88% |
| | | Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik | $\frac{\text{Jumlah Alat Bantu Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah Alat Berat}} \times 100$ | 33,33% | 35% |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULA PENGUKURAN | CAPAIAN EXISTING 2022/2023 | TARGET KINERJA 2024 |
|----|---|--|--|----------------------------------|---------------------------|
| 10 | Tujuan/Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium | Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik | Jumlah Alat Laboratorium $\frac{\text{Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Jumlah}} \times 100$ Alat Laboratorium | 92,5% | 95% |
| 11 | Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD | Nilai Evaluasi SAKIP | Hasil Evaluasi nilai Sakip Oleh Inspektorat | BB | BB |

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA KHUSUS TAHUN 2024
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

| No | Uraian | Target 2024 | OPD |
|----|--|------------------|-------------|
| 1 | Nilai RB OPD | BB | Seluruh OPD |
| 2 | Nilai Evaluasi AKIP OPD | BB | Seluruh OPD |
| 3 | Persentase tindak lanjut LHP OPD | 75% | Seluruh OPD |
| 4 | Persentase Pemenuhan LPPD OPD | 100% | Seluruh OPD |
| 5 | Kategori Inovasi OPD | inovatif | Seluruh OPD |
| 6 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD | Cukup Informatif | Seluruh OPD |
| 7 | Persentase Pencapaian MCP Redaksi KPK | 80% | Seluruh OPD |
| 8 | Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA) | 95% | Seluruh OPD |
| 9 | Indeks Profesionalisme ASN | 63% | Seluruh OPD |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara priodik.

Sistem yang dimaksud adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan prasarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis Indikator sarasannya, sedangkan kelompok Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur Kegiatan adalah Input, output, outcome.

- ✧ Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input dapat berupa dana dengan satuan rupiah, sumber daya manusia dengan satuan orang dan sebagainya;
- ✧ Indikator outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya ukuran pada tingkat percayaan kinerja tertentu yang diharapkan terwujud berdasarkan output dari kegiatan yang dilaksanakan, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan modal dan jumlah unit yang telah menerapkan sistim akuntabilitas instansi pemerintah yang baik.

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

3.1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mempunyai 10 (sepuluh) sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang ingin di capai sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2024 yang sudah ditetapkan. adapun capaian setiap sasaran yang ada dan target indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2023 dapat di tuangkan dalam tabel – tabel dibawah ini berikut :

- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan

Capaian Kinerja Sasaran :

“**Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan**” diukur dengan menggunakan 1 Indikator Kinerja, yaitu :

TABEL 3.1

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 1 : Persentase Penanganan Jalan Provinsi

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SAT | TARG ET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|--|-----|------------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase penanganan Jalan Provinsi | % | 1,91 | 0,97 | 3,69 | 4,09 | 2,83 | 148,17 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 148,17 |

Untuk Indikator persentase penanganan jalan provinsi dari target 1,91% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 2,83% naik sekitar 0,92% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 148,17%. Ini dikarenakan adanya penambahan anggaran menjadikan volume pekerjaan yang dilakukan dapat maksimal dari volume yang telah direncanakan sehingga realisasi penanganan jalan realisasi nya lebih besar dibandingkan target yang sudah ditentukan.

Pada Tahun 2023 persentase penanganan jalan provinsi dari target 1,56% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

4,09% naik sekitar 0,4% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 110,84%. Ini dikarenakan adanya perubahan SK panjang jalan provinsi yang tadinya panjang jalan provinsi 1.563,7 Km pada SK tahun 2008 menjadi 1330,166 Km pada Draft SK terbaru tahun 2023 sehingga dari penanganan jalan 54,471 Km yang sudah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023 realisasinya lebih besar dibandingkan target yang sudah ditentukan. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 dimana realisasi capaian untuk indikator persentase penanganan jalan provinsi hanya terealisasi 3,69% pada tahun 2022 naik sekitar 0,4% pada tahun 2023 dimana kenaikan ini didukung oleh 2 (Dua) kegiatan penanganan Longsegment yang bersumber dari DAK pada 2 ruas jalan provinsi yang berada pada Kabupaten Bengkulu Selatan (12,259 Km) dan Kabupaten Kaur (11,561 Km). Sedangkan pada tahun 2021 terealisasi 0,97% dimana tahun 2021 alokasi anggaran pada APBD Provinsi masih fokus pada penanganan Covid-19 sedangkan untuk jalan masih sangat kecil. Selain itu adanya peningkatan jalan yang diaspal tahun 2021 sepanjang 1.331,27 Km.

Untuk target pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2024 untuk penanganan jalan provinsi sebesar 1,91% sama dengan target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dan tercapai lebih dari target yang sudah ditetapkan. Ini dapat dilihat pada tabel 3.1.1 dibawah ini :

Tabel 3.1.1

Target Indikator Persentase Penanganan Jalan Provinsi pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 Persentase penanganan Jalan Provinsi | % | 1,91 % | 1,91 % | 2,83 | 148,17 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 148,17 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan penanganan jalan provinsi dengan mengoptimalkan anggaran APBD untuk penanganan Jalan dan Jembatan baik pembangunan, peningkatan/rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Selain dari APBD Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kinerja jalan setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu juga mencari sumber pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
3. Rekonstruksi Jalan;
4. Pemeliharaan Berkala Jalan;
5. Pemeliharaan Rutin Jalan;
6. Pembangunan Jembatan;
7. Pemeliharaan Rutin Jembatan;
8. Rehabilitasi Jalan
9. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

❖ Sasaran 2 : Terpenuhiya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan

Capaian Kinerja Sasaran **“Terpenuhiya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan”** diukur dengan menggunakan 2 Indikator Kinerja, yaitu :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

TABEL 3.2

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 2 : Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dan Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATU AN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|---|------------|---------|-----------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, | % | 28,13 % | 21,18 | 23,5 | 31,56 | 26,44 | 93,99 |
| 2 Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan | % | 71,87 % | 58,53 | 49,57 | 41,51 | 73,56 | 102,35 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 98,17 |

Untuk Indikator Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (yang merupakan tugas dan fungsi bidang Cipta Karya) dari target 28,13% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 26,44% atau turun 1,69% dari target yang sudah ditentukan dengan persentase capaian 93,99%. Capaian Kinerja ini diperoleh dari survey primer yang dilakukan bidang Cipta Karya dari Sambungan Rumah (SR) PDAM ditambah dengan Sambungan Rumah (SR) dari Pamsimas.

Pada Tahun 2023 untuk indikator Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan dari target 25,81% terealisasi 31,56% dengan persentase capaian 122,27%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

realisasi capaian untuk indikator Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan perpipaan hanya terealisasi 23,5% pada tahun 2022 naik sekitar 8,06% pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi capaian untuk indikator Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan hanya terealisasi 21,18 pada tahun 2021 naik sekitar 2,62% pada tahun 2022.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan perpipaan sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 28,13 % ini menunjukkan adanya konsistensi dalam perencanaan maupun penganggaran, ini dapat dilihat pada tabel 3.2.1 dibawah ini :

Tabel 3.2.1

Target Indikator Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2023 |
|--|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, | % | 28,13 | 28,13 % | 26,44 | 93,99 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 93,99 |

Sedangkan untuk Indikator Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan merupakan gabungan capaian dari beberapa kinerja OPD, Dimana secara perhitungan untuk mendapatkan capaian kinerja ini target persentase rumah tangga dengan akses air minum layak dikurangi persentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan perpipaan didapatkan persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan. Target untuk indikator ini ditahun 2024 yaitu 71,81% terealisasi 73,56 atau naik 1,75% dengan capaian 102,35%. Capaian ini merupakan hasil pengurangan total akses air minum layak yaitu



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

100% dikurangi realisasi persentase rumah tangga akses air minum perpipaan dimana terealisasi 26,44 % sehingga didapatkan 73,56% untuk persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 untuk persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan non perpipaan yaitu 73,07% dikurangi 31,56% didapatkan hasil 41,51%. turun sekitar 8,06% dari capaian tahun sebelumnya atau dengan persentase capaian 61,56%. Untuk realisasi kinerja tahun 2022 dimana realisasi capaian untuk indikator Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan hanya terealisasi 49, 57 % dan realisasi tahun 2021 sebesar 58,53% turun sekitar 8,96% pada tahun 2022.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 71,81% ini menunjukkan adanya konsistensi dalam perencanaan maupun penganggaran. Ini dapat dilihat pada tabel 3.2.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.2

Target Indikator Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan | % | 71,81 | 71,81 % | 73,56 | 102,35 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 102,35 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Dikarenakan dua indikator ini merupakan indikator pendukung untuk Indikator Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak jadi kedua indikator ini jika di gabungkan diharapkan dapat tercapai 100% di tahun 2024. Sehingga jika kondisi jaringan perpipaan bertambah maka secara otomatis jaringan non perpipaannya berkurang. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu untuk melanjutkan Pembangunan SPAM Regional Kobema pada tahun 2024 dan akan menjadi program prioritas daerah Provinsi Bengkulu.

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan;

❖ Sasaran 3 : Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak
Capaian Kinerja Sasaran :

“Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak” diukur dengan menggunakan 1 Indikator Kinerja, yaitu :

TABEL 3.3

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 3 : Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATU AN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPIAN 2023 |
|--|------------|--------|-----------|-------|-------|-------|------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak | % | 85 % | 78,10 | 79,58 | 80,28 | 83,61 | 98,36 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 98,36 |

Untuk Indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak dari target 85% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

2024 dari target 85% yang sudah ditentukan pada Perjanjian Kinerja (PK) terealisasi 83,61% atau turun 1,39 dari target yang sudah ditentukan dengan capaian 98,36%. Ini dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasi untuk kegiatan penanganan sanitasi. Tahun 2024 ini baru disusunnya Laporan Kebijakan Strategis Daerah Sanitasi yang akan di Perda kan Pada Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak hanya terealisasi 80,28% pada tahun 2023 naik sekitar 0,7% dari tahun 2022 dimana realisasi indikator ini sebesar 79,58%. Dan Pada Tahun 2021 untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak hanya terealisasi 78,10% pada tahun 2021 naik sekitar 1,48% pada tahun 2022.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak jaringan perpipaan sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 85% ini menunjukkan adanya konsistensi dalam perencanaan maupun penganggaran. Ini dapat dilihat pada table 3.3.1 dibawah ini.

Tabel 3.3.1

Target Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak | % | 85 | 85 % | 83,61 | 98,36 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 98,36 |

Dikarenakan pada tahun 2024 ini hanya ada kegiatan penyusunan laporan kebijakan strategis daerah yang mendukung untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, maka upaya untuk meningkatkan kinerja sanitasi



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

layak yang menjadi kewenangan provinsi dengan mengusulkan anggaran untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional.

- ❖ Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung
Capaian Kinerja Sasaran :

“Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung” diukur dengan menggunakan 3 Indikator Kinerja, yaitu:

TABEL 3.4

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 4 : Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam Kondisi Baik, Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % Capaian 2024 |
|---|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik | % | 22,72 | 17,39 | 9,09 | 13,63 | 36,36 | 160,03 |
| 2 Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan | % | 40,90 | 39,13 | 59,09 | 54,54 | 40,90 | 100 |
| 3 Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang | % | 27,27 | 39,13 | 22,72 | 22,72 | 13,64 | 50,01 |
| 4 Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat | % | 9,09 | 4,35 | 4,35 | 9,09 | 9,09 | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 102,51 |

Untuk Indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Baik dari target 22,72% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Tahun 2024 terealisasi 36,36% naik sekitar 13,64% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 160,03%. Capaian indikator ini didapatkan karena pada tahun 2024 ini ada beberapa bangunan strategis provinsi yang dibangun seperti Gedung Kantor Gubernur, Rehabilitasi Penataan Kawasan Balai Buntar, Penataan Kawasan Taman Budaya, Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Gubernur Bengkulu, dan Rehabilitasi gedung strategis provinsi Bengkulu sehingga menambah persentase kondisi baik untuk Bangunan Strategis Provinsi Bengkulu.

Adapun Indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Baik dari target 13,63% Tahun 2023 terealisasi 13,63% naik sekitar 4,54% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 100%. Capaian ini diperoleh dari 22 Unit/Kawasan Gedung yang ada di SK Bangunan Strategis ada 3 unit dalam kondisi baik. Sedangkan Indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan dari target 54,54% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi 54,54% atau dengan capaian 100%. Capaian ini diperoleh dari 22 Unit/Kawasan Gedung yang ada di SK Bangunan Strategis 12 unit diantaranya mengalami rusak ringan seperti plafond Lepas/Bocor, Lantai Keramik Pecah dan kerusakan kecil lainnya tetapi kondisi ini masih layak untuk di gunakan.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan hanya terealisasi 59,09% pada tahun 2022 turun sekitar 13,84% pada tahun 2023. Untuk Indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang dari target 22,72% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi juga 22,72% atau dengan capaian 100%. Capaian ini diperoleh dari 22 Unit/Kawasan Gedung yang ada di SK Bangunan Strategis 5 (lima) Unit diantaranya mengalami rusak sedang.

Sedangkan untuk Indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat dari target 9,09% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi 9,09% atau capaian masih sama dengan tahun lalu. Sedangkan realisasi tahun 2021 lalu persentase bangunan Gedung



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

strategis dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat tidak kenaikannya tidak terlalu signifikan dikarenakan tahun 2021 yang lalu alokasi anggaran pada APBD Provinsi masih fokus pada penanganan Covid-19 sedangkan untuk gedung masih sangat kecil.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Baik yaitu 21,74%, Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan yaitu 39,13%, Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang 26,09%, dan Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat 4,35% atau sedikit banyak perubahan dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran dari perencanaan maupun penganggaran. Ini dapat terlihat pada tabel 3.4.1 dibawah ini :

Tabel 3.4.1

Target Indikator Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam Kondisi Baik, Rusak Ringan, Rusak Sedang, dan Rusak Berat pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik | % | 21,74 | 22,72 % | 36,36 | 160,03 |
| 2 Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan | % | 39,13 | 40,90 % | 40,90 | 100 |
| 3 Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang | % | 26,09 | 27,27 % | 13,64 | 50,01 |
| 4 Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat | % | 4,35 | 9,09 % | 9,09 | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 102,51 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Upaya untuk meningkatkan kinerja bangunan strategis dengan mengusulkan kembali kegiatan yang mendukung kinerja seperti rehabilitasi ataupun penataan Kawasan untuk bangunan strategis. Sehingga bangunan – bangunan yang sudah ada di Surat Keputusan Gubernur untuk Bangunan Strategis Provinsi Bengkulu tetap dipertahankan kualitasnya.

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Pembangunan, Pemamfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Strategis;
2. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
3. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

❖ Sasaran 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi
Capaian Kinerja Sasaran

“Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi” diukur dengan menggunakan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

TABEL 3.5

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 5 : Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Baik, Sedang, dan Rusak

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang | % | 59,61% | 56,72 | 57,60 | 57,40 | 59,61 | 100 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2 Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak | % | 40,39% | 43,28 | 42,60 | 42,60 | 40,39 | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 100 |

Adapun untuk Indikator persentase Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang dari target 59,61% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 59,61% atau dengan capaian 100%. Ini dikarenakan adanya konsistensi perencanaan dan penganggaran dan didukung oleh beberapa kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk Indikator persentase Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang tahun 2023 terealisasi 57,40% turun sekitar 0,28% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 99,51%. Ini dikarenakan tahun ini kegiatan yang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi beberapa jaringan irigasi hanya dapat mengairi sawah 68 Ha dari penanganan Jaringan Irigasi Permukaan dan Jaringan Irigasi rawa. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang hanya terealisasi 56,60% pada tahun 2022 turun sekitar 0,20% pada tahun 2023.

Sedangkan untuk Indikator persentase Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi rusak dari target 42,32% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi 42,60% naik sekitar 0,28% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 100,66%. Ini berbanding lurus dengan indikator Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang jika kinerja ini bertambah maka kondisi irigasi wewenang provinsi dalam kondisi rusak akan berkurang . Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi rusak sama dengan realisasi pada tahun 2022. Ini bukannya



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

tidak adanya peningkatan karena saat penyusunan PK Tahun 2023 target yang ditetapkan masih menggunakan target renstra, tanpa melihat capaian yang telah dicapai ditahun sebelumnya. Untuk Tahun 2021 realisasi capaian untuk indikator Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang hanya terealisasi 56,72% pada tahun 2021 naik sekitar 0,46% pada tahun 2022 sedangkan untuk realisasi capaian untuk indikator Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi rusak hanya terealisasi 43,28% pada tahun 2021 naik sekitar 1% pada tahun 2022.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang dan Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi rusak tidak sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 59,18% dan 40,82% atau sedikit banyak perubahan dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran dari perencanaan maupun penganggaran. Ini dapat dilihat pada tabel 3.5.1 dibawah ini :

Tabel 3.5.1

Target Indikator Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Baik, Sedang, dan Rusak pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang | % | 59,18% | 59,61 % | 59,61 | 100 |
| 2 Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak | % | 40,82% | 40,39 % | 40,39 | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 100 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang dan Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi rusak dengan mengusulkan kembali kegiatan rehabilitasi ayaupun peningkatan jaringan irigasi baik primer maupun sekunder serta pemeliharaan atau optimalisasi jaringan irigasi baik daerah irigasi permukaan maupun daerah irigasi rawa sehingga jaringan irigasi kewenangan provinsi dengan yang sudah ada tetap dipertahankan kualitasnya.

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa;
4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
5. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa;
6. Operasional Unit Pengelola Irigasi.

- ❖ Sasaran 6: Meningkatnya pengamanan terhadap sungai
Capaian Kinerja Sasaran **“Meningkatnya pengamanan terhadap sungai”**
diukur dengan menggunakan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

TABEL 3.6

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

**Indikator Sasaran 6 : Persentase Penanganan normalisasi Sungai dan
Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi**

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|--------|-----------|------|------|------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi | % | 0,50 | 0,423 | 0,44 | 1,13 | 1,33 | 266 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 266 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Adapun untuk Indikator Persentase Penanganan normalisasi Sungai dan Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi dari target 0,50% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 1,33% atau dengan capaian 266%. Ini dikarenakan adanya kesalahan saat penginputan target di awal penyusunan Rencana Kerja (Renja) sehingga pada saat penambahan anggaran yang terjadi pada saat penginputan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Target yang sudah di input lupa disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sehingga saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 sehingga capaian melebihi 100%.

Untuk Tahun 2023 Indikator Persentase Penanganan normalisasi sungai dari target 1,72% terealisasi 0,46% turun sekitar 1,26% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 26,74%. Ini dikarenakan adanya perubahan lokasi untuk penanganan normalisasi yang tadinya akan dilaksanakan di kabupaten Bengkulu utara dengan kondisi lapangan yang sesuai dengan anggaran diperjalan di alihkan ke kabupaten seluma dengan kondisi lapangan yang sulit di sehingga saat penentuan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 tidak disesuaikan dengan anggaran yang ada. Adapun kegiatan untuk mendukung indikator tersebut seperti pembangunan tanggul sungai dan pemeliharaan operasional sungai anggarannya masih belum mencukupi untuk mencapai target yg telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator persentase Persentase Penanganan normalisasi sungai hanya terealisasi 0,44% pada tahun 2022 naik sekitar 0,020% pada tahun 2023.

Sedangkan untuk tahun 2021 realisasi capaian untuk indikator persentase Persentase Penanganan normalisasi sungai hanya terealisasi 0,423% naik sekitar 0,02% pada tahun 2022 dan untuk realisasi capaian untuk indikator Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi hanya terealisasi 0,42% pada tahun 2021 naik sekitar 0,71% pada tahun 2022. Untuk Indikator Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi dari target 1% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi 1,13% naik 0,13% dari target



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

yang sudah ditentukan atau dengan capaian 113%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi sama dengan realisasi pada tahun 2022. Ini bukannya tidak adanya peningkatan karena saat penyusunan PK Tahun 2023 target yang ditetapkan masih menggunakan target renstra, tanpa melihat capaian yang telah dicapai ditahun sebelumnya.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase Penanganan normalisasi Sungai tidak sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 1% atau sedikit banyak perubahan dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran dari perencanaan maupun penganggaran. Ini dapat dilihat pada tabel 3.6.1 dibawah ini :

Tabel 3.6.1

Target Indikator Persentase Penanganan normalisasi Sungai dan Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2023 | % CAPAIAN 2023 |
|--|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi | % | 1 | 0,50 % | 1,33 | 266 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 266 |

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase Penanganan normalisasi Sungai dan Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi yaitu mengusul kembali kegiatan yang mendukung capaian kedua indikator tersebut Dimana pada tahun 2024 ini kegiatan untuk mendukung indikator ini masih minim anggaran sehingga untuk penanganan normalisasi Sungai masih belum optimal.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
2. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi;
3. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;
5. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
6. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi;
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi.

❖ Sasaran 7: Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi

Capaian Kinerja Sasaran :

“**Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi**” diukur dengan menggunakan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

TABEL 3.7

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 7 : Persentase Pelatihan yang dilaksanakan

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|--------|-----------|------|------|------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase Pelatihan yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 100 |

Untuk Indikator Persentase Pelatihan yang dilaksanakan dari target 100% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 100% sama dengan target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 100%. Ini dikarenakan adanya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran dimana



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

target kegiatan pelaksanaan pelatihan jasa konstruksi direncanakan 1 kali selesai tepat waktu walaupun peserta yang ikut hanya 25 Orang karena adanya keterbatasan anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Persentase Pelatihan yang dilaksanakan terealisasi 100% pada tahun 2023 atau sama dengan realisasi pada tahun 2022. Sedangkan realisasi capaian untuk indikator Persentase Pelatihan yang dilaksanakan terealisasi 100% pada tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan target Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase Pelatihan yang dilaksanakan sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 100% ini menunjukkan adanya konsistensi dalam perencanaan maupun penganggaran. Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase Pelatihan yang dilaksanakan yaitu mengusulkan Kembali kegiatan untuk pelatihan tenaga ahli konstruksi, SiPJAKI, dan pembinaan guna meningkatkan cakupan pengembangan jasa konstruksi di provinsi Bengkulu. Ini dapat dilihat pada tabel 3.7.1 dibawah ini :

Tabel 3.7.1

Target Indikator Persentase Pelatihan yang dilaksanakan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Persentase Pelatihan yang dilaksanakan | % | 100 | 100 % | 100 | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 100 |

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi; Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- ❖ Sasaran 8: Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang
Capaian Kinerja Sasaran “**Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang**” diukur dengan menggunakan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

TABEL 3.8

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 8 : Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|--------|-----------|------|------|------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 100 |

Untuk Indikator Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang dari target 100% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 100% atau dengan capaian 100%. Ini dikarenakan PERDA RTRW Provinsi 2023 – 2043 sudah selesai disusun dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang lainnya yaitu penyusunan laporan – laporan terkait penyelenggaraan tata ruang selesai disusun tepat waktu. Sedangkan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang hanya terealisasi 100% pada tahun 2023 dan 100% di tahun 2022 sama dengan capaian pada tahun 2023.

Untuk realisasi capaian untuk indikator Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang hanya terealisasi 92% pada tahun 2021 naik sekitar 8% pada tahun 2022, ini dikarenakan tahun 2021 sampai 2022 masih dalam proses naskah akademis untuk revisi RTRW Provinsi Bengkulu.

Jika dibandingkan dengan target Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase Pelatihan yang dilaksanakan sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 100% ini menunjukkan adanya konsistensi dalam perencanaan maupun penganggaran. Ini dapat dilihat pada tabel 3.8.1 dibawah ini :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Tabel 3.8.1

Target Indikator Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang | % | 100 | 100 % | 100 | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 100 |

Upaya untuk meningkatkan kinerja Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang yaitu mengusulkan kembali kegiatan untuk laporan – laporan baik monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan tata ruang di provinsi Bengkulu.

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR kabupaten/kota;
 2. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.
- ❖ Sasaran 9: Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat

Capaian Kinerja Sasaran :

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat” diukur dengan menggunakan 2 Indikator Kinerja, yaitu:

TABEL 3.9

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 9 : Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik dan Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|--------|-----------|------|------|------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik | % | 88 | 77 | 75 | 87,5 | 90 | 102,27 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2 Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik | % | 35 | 69 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 95,22 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 98,74 |

Adapun Indikator Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik dari target 88% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 90% naik sekitar 2% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 102,27%. Ini dikarenakan dari 10 unit jumlah alat berat yang ada hanya 9 Unit dalam kondisi baik. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana target 80% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi 87,5% naik sekitar 7,5% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 109,37%. Ini dikarenakan dari 8 unit jumlah alat berat yang ada hanya 7 Unit dalam kondisi baik. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik terealisasi 75% pada tahun 2022 naik sekitar 12,5% pada tahun 2023.

Sedangkan untuk Indikator Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik dari target 35% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 33,3% turun sekitar 2% dari target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 95,22%. Ini dikarenakan dari 3 unit jumlah alat bantu yang ada hanya 1 Unit dalam kondisi baik dan bisa beroperasi. Untuk realisasi kinerja tahun lalu dimana realisasi capaian untuk indikator Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik terealisasi 33,33% pada tahun 2023 dan sama dengan capaian pada tahun 2022.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase Alat Berat dan Alat Bantu dalam kondisi baik tidak sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu 82% dan 76% atau sedikit banyak perubahan dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran dari perencanaan maupun penganggaran.. Ini dapat dilihat pada tabel 3.9.1 dibawah ini :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Tabel 3.9.1

Target Indikator Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik dan Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|--|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik | % | 82 | 88 % | 87,5 | 102,27 |
| 2 Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik | % | 76 | 35 % | 33,33 | 95,22 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 98,74 |

Upaya untuk meningkatkan kinerja Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik dan yaitu mengusulkan kembali kegiatan yang mendukung kedua indikator tersebut baik pengadaan untuk alat berat dan alat bantu ataupun pemeliharaan rutin untuk alat berat dan alat bantu untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi alat berat dan alat bantu yang sudah ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu setiap tahunnya.

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pengadaan Alat Besar.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

- ❖ Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium
Capaian Kinerja Sasaran :
“**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium**” diukur dengan menggunakan 1 Indikator Kinerja, yaitu:

TABEL 3.10

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 10 : Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|--------|-----------|------|------|------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Persentase Alat laboratorium dalam kondisi baik | % | 95 | 80 | 85 | 92,5 | 92,5 | 97,36 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 97,36 |

Untuk Indikator Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik dari target 95% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi 92,5% turun sekitar 2,5% atau dengan capaian 97,36%. Hal ini dikarenakan tidak ada pemeliharaan atau kegiatan kalibrasi maupun penambahan alat laboratorium yang baru sehingga untuk alat labofratorium dari 40 Jenis Alat Laboratorium yang ada hanya 37 Jenis Alat Laboratorium dalam kondisi baik sama dengan capaian tahun 2023.

Pada tahun 2023 untuk Indikator Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi Baik dari target 90% yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terealisasi 92,5% naik sekitar 2,5% atau dengan capaian 102,77%. Hal ini dikarenakan dari 40 Jenis Alat Laboratorium yang ada hanya 37 Jenis Alat Laboratorium dalam kondisi baik.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Persentase Alat Laboratorium dalam kondisi baik tidak sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK dimana target Renstra yaitu 96 % dan target PK 95% ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran ditahun sebelumnya sehingga pada PK tahun 2024 Ini dapat dilihat pada tabel 3.10.1 dibawah ini :



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Tabel 3.10.1

Target Indikator Persentase Alat laboratorium dalam kondisi baik pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|---|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Persentase Alat laboratorium dalam kondisi baik | % | 96 | 95 % | 92,5 | 97,36 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 97,36 |

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi alat laboratorium dalam kondisi baik dengan melakukan kalibrasi atau pemeliharaan alat laboratorium untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dari alat laboratorium yang ada.

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

❖ Sasaran 11 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Capaian Kinerja Sasaran :

“Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD” diukur dengan menggunakan 1 Indikator Kinerja, yaitu:



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

TABEL 3.11

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

Indikator Sasaran 11 : Nilai Evaluasi SAKIP

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | | | | % CAPAIAN 2024 |
|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------|------|------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 Nilai Evaluasi SAKIP | % | BB | BB | BB | BB | BB | 100 |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | | | 100 |

Untuk Indikator Nilai Evaluasi SAKIP dari target BB yang sudah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terealisasi BB sesuai target yang sudah ditentukan atau dengan capaian 100%. Ini berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan Inspektorat Provinsi Bengkulu terhadap Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) tahun 2024 dengan nilai 74,85 (Tujuh Puluh Empat Koma Delapan Puluh Lima) atau naik 1,04 dari Tahun 2023 dimana capaian 73,81 (Tujuh Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Satu) dengan predikat BB (Sangat Baik). Jika dibandingkan tahun lalu SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu juga mendapatkan Nilai BB.

Jika melihat dari target Renstra tahun 2024 untuk Nilai Evaluasi SAKIP sama dengan target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja PK yaitu BB ini menunjukkan adanya konsistensi dalam perencanaan maupun penganggaran. Ini dapat terlihat pada tabel 3.11.1 dibawah ini :

Tabel 3.11.1

Target Indikator Nilai Evaluasi SAKIP pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

| URAIAN/ INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RENSTRA TH. 2024 | TARGET TH. 2024 | REALISASI TH. 2024 | % CAPAIAN 2024 |
|---------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1 Nilai Evaluasi SAKIP | Predikat | BB | BB | BB | BB |
| Persentase Capaian Sasaran Ini adalah | | | | | 100 |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Upaya yang dilakukan agar dapat meningkatkan atau mempertahankan Nilai Evaluasi SAKIP di tahun mendatang dengan cara memperbaiki setiap dokumen – dokumen mulai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi.

Adapun Kegiatan ataupun sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja diatas antara lain, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
7. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
8. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
14. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
15. Pengadaan Mebel;
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Penyediaan jasa surat menyurat;
18. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik;
19. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor;
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.2 Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Selain Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu juga Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Kegiatan Prioritas Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Khusus Tahun 2024 yang ditandatangani bersama Gubernur dan dilakukan serentak dengan Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Adapun Target, Realisasi dari Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut.

TABEL 3.12
PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN PRIORITAS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

| NO | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | KET |
|----|---|--|---------|-----------|----------|
| 1 | Pembangunan Pipa Distribusi SPAM Regional | Panjang Pipa yang dibangun | 14,5 Km | 15,423 Km | Tercapai |
| 2 | Konektivitas Jalan | 1. Penanganan Long Segmen Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini DAK | 1 Paket | 1 Paket | Tercapai |
| | | 2. Penanganan Long Segmen Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Jalan Permu Beringin Tiga DAK | 1 Paket | 1 Paket | Tercapai |
| | | 3. Penanganan Long Segmen Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala, Peningkatan / Rekonstruksi) Ruas Jalan Wisata Air Terjun Curup IX DAK | 1 Paket | 1 Paket | Tercapai |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Dari 4 (Empat) Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas yang di Perjanjikan ke empat Indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Sehingga untuk kegiatan prioritas pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan keberhasilan kinerja rata – rata 100%.

1.3 Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Khusus merupakan Capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Seluruh OPD memiliki tanggung jawab dalam memenuhi target-target ini, Adapun Target, Realisasi dari Perjanjian Kinerja Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

TABEL 3.13
PERJANJIAN KINERJA KHUSUS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BENKULU TAHUN 2024

| NO | URAIAN | TARGET 2024 | REALISASI 2024 | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Nilai RB OPD | BB | B | Tidak Tercapai |
| 2 | Nilai Evaluasi AKIP OPD | BB | BB | Tercapai |
| 3 | Persentase tindak lanjut LHP OPD | 75% | 57,78% | Tidak Tercapai |
| 4 | Persentase Pemenuhan LPPD OPD | 100% | 100% | Tercapai |
| 5 | Kategori Inovasi OPD | inovatif | Kurang inovatif | Tidak Tercapai |
| 6 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD | Cukup Informatif | Cukup Informatif | Tercapai |
| 7 | Persentase Pencapaian MCP Redaksi KPK | 80% | 80,15% | Tercapai |
| 8 | Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA) | 95% | 95,90 % | Tercapai |
| 9 | Indeks Profesionalisme ASN | 63% | 64,23% | Tercapai |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Diantara 9 (Sembilan) yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Khusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu ada 6 (enam) yang tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan yaitu Nilai AKIP OPD, Persentase Tindak Lanjut LHP OPD, Persentase Pemenuhan LPPD OPD, Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD, Persentase Pencapaian MCP Redaksi KPK, Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Indeks Profesionalisme ASN. Sedangkan ada 3 (tiga) yang tidak tercapai diantaranya Nilai Indeks RB OPD, Persentase tindak lanjut LHP OPD, dan Kategori Inovasi OPD.

B. Akuntabilitas Keuangan

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan sangat dipengaruhi oleh dukungan anggaran. Dimana Dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Reguler Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024 Berjumlah **Rp. 244.867.555.972,-** setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 Berjumlah **Rp. 249.179.685.130,-** dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.14

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | |
|---|---|--|---|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| | | | | | KEUANGAN (Rp) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU | | | | 249.179.685.130 | 233.456.520.076 | 93,69 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas jaringan jalan | Persentase penanganan Jalan Provinsi | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 96.287.389.300 | 83.209.116.906 | 86,42 | |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 2.889.534.300 | 2.449.953.152 | 84,79 | |
| | | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 1.040.000.000 | 920.687.159 | 88,53 | |
| | | | Rekonstruksi Jalan | 33.925.220.400 | 33.201.023.374 | 97,87 | 100 |
| | | | Pemeliharaan Berkala Jalan | 35.165.224.700 | 34.099.941.100 | 96,97 | 100 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jalan | 10.636.140.000 | 5.858.688.142 | 55,08 | 100 |
| | | | Pembangunan Jembatan | 4.075.790.000 | 4.031.703.300 | 98,92 | |
| | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 600.000.000 | 329.965.400 | 54,99 | |
| | | | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi | 2.559.979.900 | 2.317.155.279 | 90,51 | |
| | | | Rehabilitasi Jalan | 5.395.500.000 | 5.265.122.017 | 97,58 | |
| 2 | Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 75.868.055.740 | 75.593.276.824 | 99,64 | |
| | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | 228.022.000 | 218.078.400 | 95,64 | |
| | | | Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan | 75.640.033.740 | 75.375.198.424 | 99,65 | 100 |
| 3 | Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak | Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak | | - | - | - | |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | |
|----|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| | | | | | KEUANGAN (Rp) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) |
| 4 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 22.189.584.120 | 21.839.476.065 | 98,42 | |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan | Pembangunan, Pemamfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Strategis | 513.328.800 | 503.774.400 | 98,14 | |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 21.676.255.320 | 21.335.701.665 | 98,43 | 100 |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 1.478.284.000 | 1.432.270.476 | 96,89 | |
| | | | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1.422.804.000 | 1.377.292.151 | 96,80 | |
| | | | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 55.480.000 | 54.978.325 | 99,10 | |
| 5 | Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi | Persentase Jaringan Irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 1.399.640.800 | 1.214.043.650 | 86,74 | |
| | | Persentase Jaringan Irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 295.280.000 | 274.637.380 | 93,01 | |
| | | | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi | 495.292.000 | 458.145.420 | 92,50 | |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 325.000.000 | 314.482.950 | 96,76 | |
| | | | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 50.000.000 | 40.747.850 | 81,50 | |
| | | | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 66.164.000 | 59.379.750 | 89,75 | |
| | | | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi | 50.000.000 | 35.479.150 | 70,96 | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi | 117.904.800 | 31.171.150 | 26,44 | |
| 6 | Meningkatnya pengamanan terhadap sungai | Persentase Penanganan normalisasi sungai | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 16.330.487.000 | 15.842.973.321 | 97,01 | |
| | | Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 300.000.000 | 288.900.104 | 96,30 | |
| | | | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 12.780.409.000 | 12.387.445.568 | 96,93 | 100 |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 2.400.000.000 | 2.378.304.882 | 99,10 | |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | 500.000.000 | 494.607.993 | 98,92 | |
| | | | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | 200.000.000 | 188.483.853 | 94,24 | |
| | | | Operasional Unit Pengelola Irigasi | 150.078.000 | 105.230.921 | 70,12 | |
| | | | | | | | |
| 7 | Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi | Persentase Pelatihan yang dilaksanakan | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 220.000.000 | 186.892.892 | 84,95 | |
| | | | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan tenaga ahli konstruksi | 125.000.000 | 111.913.067 | 89,53 | |
| | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 70.000.000 | 52.360.125 | 74,80 | |
| | | | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | 25.000.000 | 22.619.700 | 90,48 | |
| 8 | Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang | Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 300.000.000 | 277.959.695 | 92,65 | |
| | | | Monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR kabupaten/kota | 175.000.000 | 161.547.905 | 92,31 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 125.000.000 | 116.411.790 | 93,13 | |
| 9 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Berat dan Alat Laboratorium | Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 396.000.000 | 391.154.300 | 98,78 | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 80.000.000 | 78.019.800 | 97,52 | |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI | | | | |
|----|------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|--|
| | | | | | KEUANGAN (Rp) | KEUANGAN (%) | FISIK (%) | | |
| | | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 5.000.000 | 4.480.000 | 89,60 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50.000.000 | 49.407.000 | 98,81 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | 261.000.000 | 259.247.500 | 99,33 | | | |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 1.007.221.500 | 971.418.656 | 96,45 | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi | 46.421.000 | 45.687.400 | 98,42 | | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 826.100.000 | 818.824.506 | 99,12 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 33.568.300 | 31.476.500 | 93,77 | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 81.132.200 | 75.430.250 | 92,97 | | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20.000.000 | 17.840.000 | 89,20 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | Meningkatnya Tata Kelola OPD | Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 33.703.022.670 | 32.497.937.291 | 96,42 | | | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 167.926.500 | 112.005.000 | 66,70 | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 111.292.000 | 93.520.000 | 84,03 | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 22.943.947.130 | 22.573.509.026 | 98,39 | | | |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 293.160.000 | 221.349.000 | 75,50 | | | |
| | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 10.000.000 | 6.565.000 | 65,65 | | | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000 | 450.000 | 4,50 | | | |
| | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 25.000.000 | - | 0,00 | | | |
| | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 50.000.000 | 45.559.900 | 91,12 | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 30.000.000 | 14.700.100 | 49,00 | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 406.609.440 | 369.094.500 | 90,77 | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 38.000.000 | 37.320.000 | 98,21 | | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 940.722.000 | 623.383.678 | 66,27 | | | |
| | | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 9.722.500 | 7.810.000 | 80,33 | | | |
| | | | Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 700.000.000 | 673.200.000 | 96,17 | | | |
| | | | Pengadaan Mebel | 900.600.000 | 864.110.000 | 95,95 | | | |
| | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.113.013.100 | 2.100.294.700 | 99,40 | | | |
| | | | Penyediaan jasa surat menyurat | 10.000.000 | 9.800.000 | 98,00 | | | |
| | | | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 715.000.000 | 706.798.370 | 98,85 | | | |
| | | | Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.938.500.000 | 2.823.566.800 | 96,09 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 355.000.000 | 302.464.104 | 85,20 | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 52.500.000 | 39.010.000 | 74,30 | | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 882.030.000 | 873.427.113 | 99,02 | | | |
| | | | JUMLAH | | | 249.179.685.130 | 233.456.520.076 | 93,69 | |



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan dari total anggaran **Rp. 249.179.685.130,-** (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terealisasi **Rp. 233.456.520.076,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau dengan capaian **93,69%**.

Jika Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan dikaitkan dengan Sumber Daya yang ada, ini dapat terlihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.15

CAPAIAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI (%) |
|----|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas jaringan jalan | Persentase penanganan Jalan Provinsi | 148,17 | 86,42 | 61,75 |
| 2 | Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan, | 98,17 | 99,64 | (-1,47) |
| | | Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan | | | |
| 3 | Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak | Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak | 98,36 | 0 | 98,36 |
| 4 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas | Persentase Bangunan Gedung Strategis | 102,51 | 97,66 | 4,85 |



LAPORAN KINERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI (%) |
|----|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| | bangunan gedung | dalam kondisi baik | | | |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan | | | |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang | | | |
| | | Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat | | | |
| 5 | Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi | Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang | 100 | 97,01 | 2,99 |
| | | Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak | | | |
| 6 | Meningkatnya pengamanan terhadap sungai | Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi | 266 | 86,74 | 179,26 |
| 7 | Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi | Persentase Pelatihan yang dilaksanakan | 100 | 84,95 | 15,05 |
| 8 | Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang | Presentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang | 100 | 92,65 | 7,35 |



LAPORAN KINERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA (%) | PENYERAPAN ANGGARAN (%) | TINGKAT EFISIENSI (%) |
|----|---|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 9 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat | Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik | 98,74 | 98,78 | (-0,04) |
| | | Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik | | | |
| 10 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium | Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik | 97,36 | 96,45 | 0,91 |
| 11 | Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD | Nilai Evaluasi SAKIP | 100 | 96,42 | 3,58 |

Keterangan :

- ❖ Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%;
- ❖ Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator;
- ❖ Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 80%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LAKIN juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang dituangkan menjadi dua sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja utama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. LAKIN juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Laporan Kinerja (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan kinerja yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode Renstra tersebut, yang pengukurannya dijabarkan dalam 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan., termasuk hambatan atau kendala, serta langkah – langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam bentuk menentukan rencana aksi selanjutnya dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024

Secara umum program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 dapat dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dengan baik. Sebanyak 11 sasaran yang ada terlaksana dengan capaian kinerja kategori baik persentase capaian kinerja diatas 100% yaitu sebesar **119,02%**. Rata – Rata Capaian ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu telah turut berkontribusi dalam pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Meskipun demikian, dalam tahun 2024 masih terdapat kendala ataupun hambatan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) antara lain, yaitu :

1. Masih terdapat kesulitan dalam pengumpulan data pada kegiatan bidang ke PU-an;
2. Kurangnya Konsistensi dari Bidang/UPTD dalam menentukan target kinerja dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kinerja tiap Bidang/UPTD;
3. Data Capaian Kinerja belum dapat merekam semua data sasaran yang diharapkan, terutama untuk data yang berada diluar kendali Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, selain itu menyangkut capaian sasaran ditemukan;

Sebagai Penutup, Kami Pimpinan beserta segenap karyawan/karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berharap Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan dan bermanfaat sebagai sumber dalam pengambilan Keputusan.

Bengkulu, 4 Februari 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,



Tejo Suroso, ST. M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197812142005021003

